

Bab I PENDAHULUAN

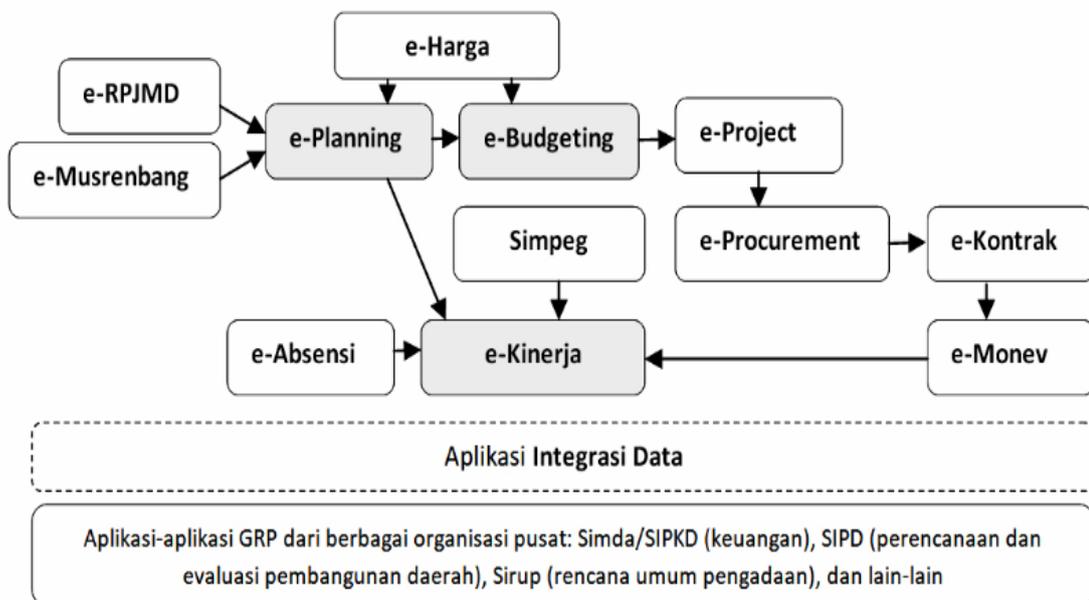
I.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini sudah semakin pesat, hal ini ditandai dengan semakin seringnya perusahaan atau instansi memanfaatkan dan menerapkannya untuk menunjang proses bisnis perusahaan. Salah satu faktor yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penerapan teknologi informasi dalam suatu perusahaan adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Pengukuran tingkat keberhasilan penerapan teknologi informasi berdasarkan faktor sumber daya manusia atau faktor pengguna dapat dilihat dari perilakunya, apakah menerima atau menolak penerapan teknologi informasi tersebut. Pada era ini teknologi informasi berkembang semakin pesat. Perubahan yang signifikan ini membuat hampir setiap perusahaan berlomba-lomba meningkatkan kualitas dari sistem perusahaan. Sistem ERP memiliki banyak keunggulan untuk menunjang perusahaan dari segala industri, seperti manufaktur, ritel, grosir, konstruksi, dan lain-lain. Sistem ERP juga memiliki beberapa manfaat utama diantaranya, untuk menyederhanakan proses bisnis, menghemat biaya, meningkatkan efisiensi, informasi terintegrasi baik, memberikan data bisnis yang akurat, serta mengoptimalkan keamanan data (Wibisono, 2005).

Konsep ERP sudah ada sejak tahun 1960, akan tetapi istilah dari ERP itu sendiri diciptakan oleh Gartner Group pada tahun 1990. Pada saat itu, konsep ini hanya diterapkan pada manajemen inventaris dan kontrol di sektor manufaktur. Pada tahun 1970-an, program ini berevolusi menjadi Material Requirements Planning (MRP) untuk penjadwalan proses produksi. ERP berbasis Cloud keluaran pertama dikeluarkan oleh Gartner Group pada tahun 2000. Menurut O'Brien, J. A. & Markas, G. M. (2010: 58) *Enterprise Resource Planning* adalah perangkat lunak yang digunakan untuk merekayasa ulang, mengotomatiskan, dan mengintegrasikan proses bisnis manufaktur, distribusi, keuangan, dan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Menurut Jogiyanto (2008), pengaruh keberhasilan penerapan teknologi cenderung pada aspek perilaku penggunaannya. ERP dapat membantu dalam bidang bisnis, diantaranya mempermudah

pengendalian proses bisnis. Sistem ERP akan menyajikan beragam data dari unit bisnis yang berbeda-beda secara sistematis, komprehensif, *real-time*, dan mudah dalam aksesnya, menyederhanakan proses bisnis ERP juga membantu sebuah perusahaan merampingkan proses bisnisnya (Wibisono, 2005).

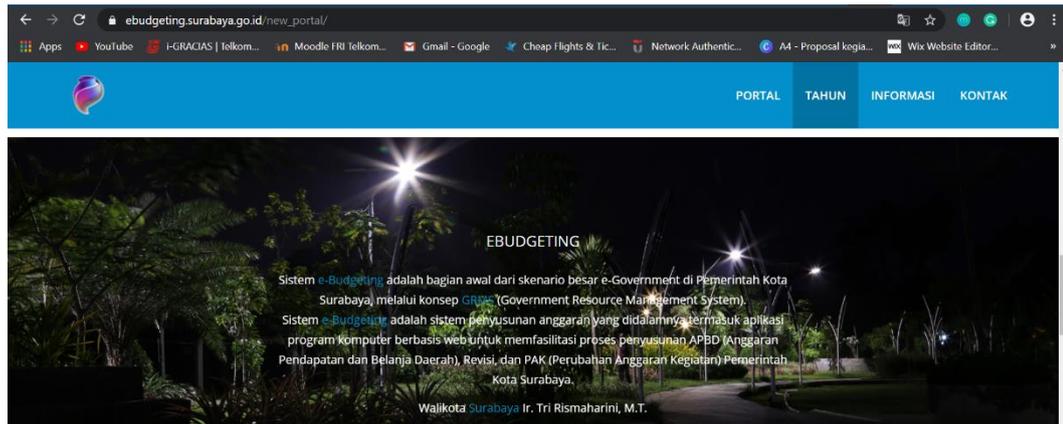
Seiring berjalannya waktu ERP terus berkembang sehingga munculah sebuah sistem yang disebut dengan GRP. GRP atau yang disebut *Government resource planning* adalah setara dengan ERP yang digunakan dalam sektor publik dan sistem otomatisasi kantor terintegrasi untuk badan-badan pemerintah. Sehingga untuk mampu menyediakan pelayanan public yang baik, sudah ada beberapa lembaga pemerintahan yang mengimplementasikan GRP. Tujuan pembangunan GRP adalah untuk membantu pencapaian tujuan pemerinthan daerah dan untuk membantu daerah dalam menjalankan fungsi administrasinya dengan baik. Aplikasi-aplikasi GRP utama tersebut umumnya menyangkut fungsi perencanaan kegiatan dan keuangan seperti yang digambarkan oleh gambar I.1.



Gambar I. 1 Aplikasi Utama GRP
 Sumber: (Tony Dwi Susanto, 2018)

Di wilayah Indonesia GRP juga sering dikenal dengan julukan GRMS (*Government Resource Management Systems*). Banyak sekali kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, menurut riset yang dilakukan oleh Badan Transparency Internasional Indonesia pada tahun 2019 negara kita berada di skor 40/100 dan berada di peringkat 85 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini meningkat 2 poin dari tahun 2018 lalu (Transparency Internasional Indonesia, 2020). Seperti tujuan dari diterapkannya GRMS itu sendiri adalah pertama, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kedua, memudahkan informasi atas keadaan atau kondisi perkembangan pelaksanaan fisik pekerjaan dan permasalahannya. Ketiga, memudahkan mengetahui akumulasi pengeluaran biaya untuk setiap kegiatan yang dalam pengerjaan dan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah dilaksanakan.

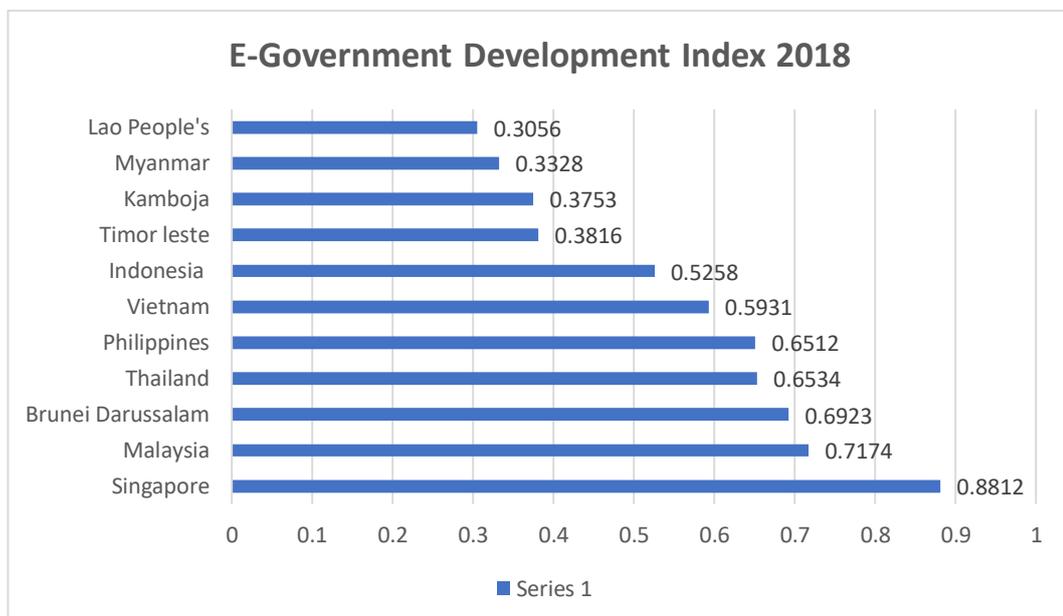
Sehingga untuk mewujudkan tuntutan layanan yang lebih baik dari sebelumnya, maka timbulah istilah *Clean and good Governance* di Indonesia. *Good Governance* memiliki makna terikat dengan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari prinsip KKN. Guna mewujudkan *Clean and good Governance* terutama dari segi akuntabilitas dan transparansi publik, maka dibutuhkan suatu langkah kebijakan yang terarah dalam perubahan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan melalui pemanfaatan e-government atau yang disebut juga dengan Pemerintahan Elektronik. *E-government* merupakan bagian dari GRMS. Pemanfaatan *e-government* bagi sektor pemerintahan diharapkan dapat menjadi alternative untuk menuju pelayanan yang lebih baik. E-government mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik khususnya pada sector pelayanan, sehingga tugas tugas yang diserahkan dari pusat dapat terintegrasi dengan baik ke daerah daerah. Salah satu contoh kota di Indonesia yang telah menerapkan e-government adalah kota Surabaya. Pemerintah kota Surabaya menerapkan *e-government* dalam bidang e-budgeting untuk mengelola perencanaan Anggaran Daerah dari kegiatan hingga ke item-item pengeluaran, dan membantu penyusunan APBD Pemkot Surabaya (Gunawan, 2016).



Gambar I. 2 Aplikasi e-budgeting pemerintahan Surabaya
Sumber: (Pembangunan, 2019)

Selain di daerah Jawa Tengah saat ini Jawa Barat juga sudah ada beberapa aplikasi yang telah dibuat, seperti pada Diskominfo Jabar, yang memiliki *command center* untuk memudahkan pengintegrasian seluruh pelayanan daerah di Jawa Barat dengan pusat data di Diskominfo Jabar. Selain Diskominfo Jabar, Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip) Kota Bandung pada tanggal 6 Desember 2019 meluncurkan aplikasi berbasis Android dan Ios yang dapat digunakan untuk mempermudah masyarakat bandung dalam mengakses buku literasi yang bernama E-PUSTAKA Bandung. E-pustaka dibuat untuk membantu pemerintah Kota Bandung dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat Bandung. Meskipun E-Pustaka tidak terikat terhadap pengelolaan keuangan kota bandung akan tetapi kembali lagi kepada salah satu tujuan dari dikembangkannya e-government yaitu, untuk dapat membentuk jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau setiap saat, dengan biaya yang terjangkau dan tanpa dibatasi oleh sekat waktu (Vita Elysia, Ake Wihadanto, 2017). Saat itu di dalamnya sudah ada 575 judul dan 7000 eksemplar e-book yang bisa 'dipinjam' secara elektronik. Jumlah tersebut terdiri dari 292 buku tentang bahasa dan 283 buku tentang agama. Pemustaka yang ingin meminjam buku di aplikasi ini diberikan waktu membaca selama 7 hari, setelah itu buku harus dikembalikan. Jika buku yang sedang dipinjam belum juga dikembalikan, maka fitur dalam aplikasi ini akan menghapus otomatis buku yang sudah dibaca dari aplikasi pemustaka (Bandung, 2019).

Dalam peraturan (PAN dan RB) No. 11 Tahun 2011 dan Intruksi Presiden No. 3/2003 telah mengamanatkan untuk mengimplementasikan *e-government* di pemerintahan pusat dan daerah. Dari hasil survey yang diadakan oleh PBB tahun 2012 mengenai perkembangan *e-government* di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat ke 7 dalam pengimplementasian *e-government*. Pada tahun 2018 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali mempublikasikan peringkat hasil survey EGDI (E-Government Development Index). Pada tahun ini Indonesia mendapat peringkat ke-107 EGDI, naik 9 peringkat dibandingkan tahun 2016 yang menduduki peringkat ke 116. Indonesia menempati peringkat ke-7 di ASEAN setelah Vietnam. Peringkat Indonesia ini masih berada jauh di bawah negara-negara di ASEAN lainnya seperti Singapura (peringkat ke-7 EDGI), Malaysia (peringkat ke-48 EDGI), Brunei Darussalam (peringkat ke-59 EDGI), Thailand (peringkat ke-73 EDGI), Philippines (peringkat ke-75 EDGI), dan Vietnam (peringkat ke-88 EDGI). Nilai rata-rata EGDI Indonesia juga masih berada di bawah rata-rata di regional Asia Tenggara. Indonesia berada pada angka 0,5258 sedangkan rata-rata EGDI di kawasan Asia Tenggara adalah 0,5555 (Dyah Puspito Dewi Widowati, 2018).



Gambar I. 3 E-Government Development Index 2018
 Sumber: (Dyah Puspito Dewi Widowati, 2018)

Salah satu model framework yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesuksesan terhadap implementasi *e-government* pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung adalah model kesuksesan *Delone and Mclean*. Model kesuksesan ini merupakan model yang terdiri dari 6 dimensi keberhasilan, diantaranya, kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, kegunaan, kepuasan pengguna, manfaat bersih. Shannon dan Weaver melakukan reset dan menyatakan bahwa komunikasi di dalam sebuah sistem informasi terbentuk atas tiga level, yaitu *Technical Level*, *Semantic Level*, *Effectiveness Level*.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana cara menganalisis kesuksesan dalam implementasi E-Pustaka pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung dengan menggunakan model kesuksesan *Delone and Mclean*?
2. Bagaimana kekuatan hubungann setiap variabel yang terdapat dalam metode *Delone and Mclean* dalam penelitian ini?
3. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kesuksesan dalam implementasi E-Pustaka pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui cara menganalisis kesuksesan dalam implementasi E-Pustaka pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung dengan menggunakan model kesuksesan *Delone and Mclean*.
2. Untuk mengetahui kekuatan hubungan setiap variabel yang terdapat dalam metode *Delone and Mclean* dalam penelitian ini.
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kesuksesan dalam implementasi E-Pustaka pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung.

I.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan dilakukannya penelitian dapat ditarik beberapa manfaat yaitu

1. Dapat mengetahui bagaimana cara menganalisis kesuksesan dalam implementasi E-Pustaka pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung dengan menggunakan model kesuksesan *Delone and Mclean*.
2. Dapat mengetahui kekuatan hubungann setiap variabel yang terdapat dalam metode *Delone and Mclean* dalam penelitian ini.
3. Dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi kesuksesan dalam pengimlementasian E-Pustaka.

I.5 Batasan masalah

Mengingat pembahasan mengenai kesuksesan implementasi *e-government* pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung sangatlah luas, maka pada pembahasan kali ini penulis akan membatasi seputar aspek faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilannya dan juga cara untuk melakukan anasilis keberhasilan menggunakan model kesuksesan *Delone and Mclean*.

I.6 Sistematika Penulisan

Adanya sistematika penulisan laporan penelitian tugas akhir setidaknya memuat:

1. BAB I Pendahuluan: pada bab 1 akan membahas gambaran secara umum tentang penelitian, diantaranya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, serta sistematika penulisan.
2. BAB II Tinjauan Pustaka: pada bab 2 akan membahas teori-teori dasar yang menjadi acuan penelitian ini.
3. BAB III Metodologi Penelitian: pada bab 3 akan membahas tentang gambaran penggunaan metodologi yang dipilih.
4. BAB IV Identifikasi dan Pengumpulan Data: pada bab 4 mengidentifikasi data yang telah terkumpul.
5. BAB V Hasil Analisis dan Pembahasan: pada bab 5 akan membahas hasil dari penelitian tugas akhir yang telah penulis jalankan.
6. BAB VI Penutup: pada bab 6 berisikan simpulan yang didapat selama penelitian, beserta saran untuk perbaikan selanjutnya.